

# RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA

(RENSTRA BP3AKB)  
PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2013-2018



**BP3AKB PROVINSI JAWA BARAT**  
**30 DESEMBER 2013**

JL. SOEKARNO HATTA 458, BANDUNG – TLP. 022-7513580

LAMPIRAN	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR	: 050/Kep.180 -.IA/Set/2013
TANGGAL	: 30 DESEMBER 2013
TENTANG	: RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA BARAT 2013-2018

## KATA PENGANTAR

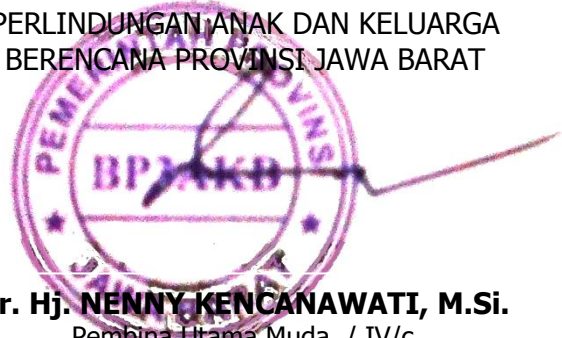
Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadlirat Allah SWT, berkat rahmat dan anugerahNya disertai kerjasama dan kebersamaan seluruh keluarga besar Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dan fasilitasi dari pejabat berwenang, telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) BP3AKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Penyusunan Renstra ini disesuaikan ketentuan yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi (RPJMD Transisi) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 sebagai salah satu acuan program perencanaan menengah OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ini menyajikan program dan kegiatan BP3AKB selama 5 (lima) tahun, mulai kurun tahun 2013 sampai dengan 2018.

Dokumen ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka penetapan program dan kegiatan untuk lima tahun mendatang. Juga diharapkan dapat membawa peningkatan kinerja BP3AKB dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Mudah-mudahan Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Barat ini dapat memberikan manfaat terutama bagi pengembangan organisasi lebih lanjut dalam penguatan manajemen pembangunan daerah, harapan yang lebih luas mudah-mudahan kinerja BP3AKB Provinsi Jawa Barat dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan Jawa Barat.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA  
BERENCANA PROVINSI JAWA BARAT



**Dr. Hj. NENNY KENCANAWATI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda / IV/c  
NIP. 19570114 1985032 002

## DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Landasan Hukum .....	2
1.3.Sistimatika Penulisan .....	4
 <b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN BP3AKB PROVINSI JAWA BARAT ...</b>	 <b>7</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BP3AKB Provinsi Jawa Barat .....	7
2.2. Sumber Daya BP3AKB Provinsi Jawa Barat .....	11
2.3. Kinerja Pelayanan BP3AKB Provinsi Jawa Barat .....	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP3AKB Provinsi Jawa Barat .....	17
 <b>BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	 <b>19</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BP3AKB Provinsi Jawa Barat .....	19
3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	22
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota .....	25
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	29
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	30
 <b>BAB IV    VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN . .</b>	 <b>38</b>
4.1. Visi dan Misi BP3AKB Provinsi Jawa Barat .....	39
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP3AKB Provinsi Jawa Barat .....	41
4.3. Strategi dan Kebijakan BP3AKB Provinsi Jawa Barat .....	44

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. ....	49
BAB VI	INDIKATOR KINERJA BP3AKB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	54
BAB VII	PENUTUP .....	56
LAMPIRAN	.....	57

## DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan BP3APKKB Provinsi Jawa Barat	13
Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BP3APKKB Provinsi Jawa Barat	15
Tabel 2.3. Komparasi Capaian Sasaran Renstra BP3APKKB Provinsi Jawa Barat Terhadap Sasaran Renstra Kabupaten/Kota dan Renstra K/L	18
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BP3APKKB Provinsi Jawa Barat	19
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BP3APKKB Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	24
Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan BP3APKKB Provinsi Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	28
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan BP3APKKB Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra BP3APKKB Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	29
Tabel 3.5. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	36
Tabel 3.6. Nilai Skala Kriteria	37
Tabel 3.7. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis	38
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BP3APKKB	43
Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	47
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BP3APKKB Provinsi Jawa Barat	52
Tabel 6.1. Indikator Kinerja BP3APKKB Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Renstra BP3APKKB) yang kemudian berubah nomenklatur pada tahun 2014 menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) dibuat dengan merujuk pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana disebutkan bahwa setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang disebut Rencana Strategis atau Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

#### **Pasal 6**

- (1) Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Di tingkat nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) 2005-2025 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2010 – 2014 dengan Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010. Selain itu mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 150 ayat 3 point (b) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dewasa ini Provinsi Jawa Barat sedang menyusun RPJMD periode tahun 2013-2018. Sedangkan untuk periode lalu, Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJM Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 - 2013. Selanjutnya dalam kerangka operasional telah ditetapkan pula Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundangan, RPJMD Provinsi Jawa Barat memuat visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP dan RPJM Daerah serta RPJP dan RPJM Nasional. RPJMD Provinsi Jawa Barat merupakan rencana

pembangunan berskala provinsi yang juga merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah. RPJMD Provinsi Jawa Barat merupakan wahana untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen di Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun.

Sebagai penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Barat yang saat ini masih berupa Draft RPJMD, selanjutnya dioperasionalkan melalui konsolidasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018.

Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Barat ini disusun melalui proses analisa potensi, permasalahan serta memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Hal ini diawali melalui proses penyelenggaraan Forum OPD BP3AKB yang berlangsung awal tahun 2013, berbagai Raker serta dengan mengkaji isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat.

Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 ini juga disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Republik Indonesia serta BKKBN Republik Indonesia, serta menjadi salah satu sumber acuan penyusunan Renstra pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan KB untuk kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.

Renstra BP3AKB ini selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) BP3AKB Provinsi Jawa Barat yang disusun setiap tahun mulai tahun 2013 sampai dengan 2018. Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Barat ini merupakan lanjutan dari Renstra BPPKB Tahun 2009-2013, dimana Renstra tersebut disusun sebagai hasil penyempurnaan dari Renstra Tahun 2004 – 2008 disaat BPPKB masih merupakan Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (RENSTRA BP3AKB) Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 8) Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2010 – 2014;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi



Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 107), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 3 Seri D dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 163);

- 12) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
- 15) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat;
- 16) Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E).

### **1.3. SISTIMATIKA PENULISAN**

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pasal 85 ayat (1), RENSTRA SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Sistimatika penulisan dokumen Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 disusun sebagai berikut :

## **Bab I : Pendahuluan**

Berisi secara ringkas pengertian Renstra BP3AKB, fungsi Renstra BP3AKB dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra BP3AKB, keterkaitan Renstra BP3AKB dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra kabupaten/kota, dan Renja BP3AKB. Memuat landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta Sistimatika penulisan Renstra.

## **Bab II : Gambaran Pelayanan BP3AKB Provinsi Jawa Barat**

Berisi uraian penjelasan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi BP3AKB Provinsi Jawa Barat dilengkapi uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon III. Sumberdaya yang dimiliki BP3AKB mencakup SDM, asset/modal, dan tata laksana. Kinerja pelayanan BP3AKB mencakup tingkat capaian kinerja berdasar sasaran/target periode sebelumnya, SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan BP3AKB. Selanjutnya juga menguraikan tantangan dan peluang pengembangan BP3AKB.

## **Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Berisi uraian tentang permasalahan pelayanan BP3AKB beserta faktor yang mempengaruhinya. Telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Faktor-faktor ini kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan BP3AKB. Selanjutnya diuraikan pula mengenai telaahan Renstra K/L dan Renstra kabupaten/kota, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

## **Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Berisi uraian ringkas tentang Visi dan Misi BP3AKB, tujuan serta sasaran jangka menengah BP3AKB, serta strategi dan kebijakan BP3AKB selama 5 (lima) tahun.

**Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2018.

**Bab VI : Indikator Kinerja BP3AKB Yang Mengaju Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Berisi uraian tentang indikator kinerja BP3AKB yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BP3AKB dalam lima tahun mendatang (tahun 2018) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BP3AKB PROVINSI JAWA BARAT**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BP3AKB PROVINSI JAWA BARAT**

##### **2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2013 adalah :

*menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.*

##### **Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, BP3AKB Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

- 1) penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;
- 2) penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana meliputi Kesekretariatan, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerja sama, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga; dan
- 3) penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

##### **2.1.2. Uraian Tugas dan Fungsi Eselon II dan III**

- 1) Kepala Badan BP3AKB mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

###### **Tugas Pokok**

Menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan.

#### Fungsi

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama kelembagaan, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan, dan keluarga berencana
- b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama kelembagaan, perlindungan dan kesejahteraan anak, pengendalian kependudukan, dan keluarga berencana.

#### 2) Sekretariat, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

##### Tugas Pokok

Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

##### Fungsi

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

#### 3) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

##### Tugas Pokok

Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan.

##### Fungsi

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- b. Penyelenggaraan fasilitasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

#### 4) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama

##### Tugas Pokok

Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengarusutamaan gender dan kerjasama.

##### Fungsi

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengarusutamaan gender dan kerjasama
- b. Penyelenggaraan fasilitasi pengarusutamaan gender dan kerjasama.

5) Bidang Perlindungan Anak

Tugas Pokok

Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan dan kesejahteraan anak.

Fungsi

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perlindungan dan kesejahteraan anak
- b. Penyelenggaraan fasilitasi perlindungan dan kesejahteraan anak.

6) Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Tugas Pokok

Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kependudukan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.

Fungsi

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kependudukan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga
- b. Penyelenggaraan fasilitasi kependudukan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.

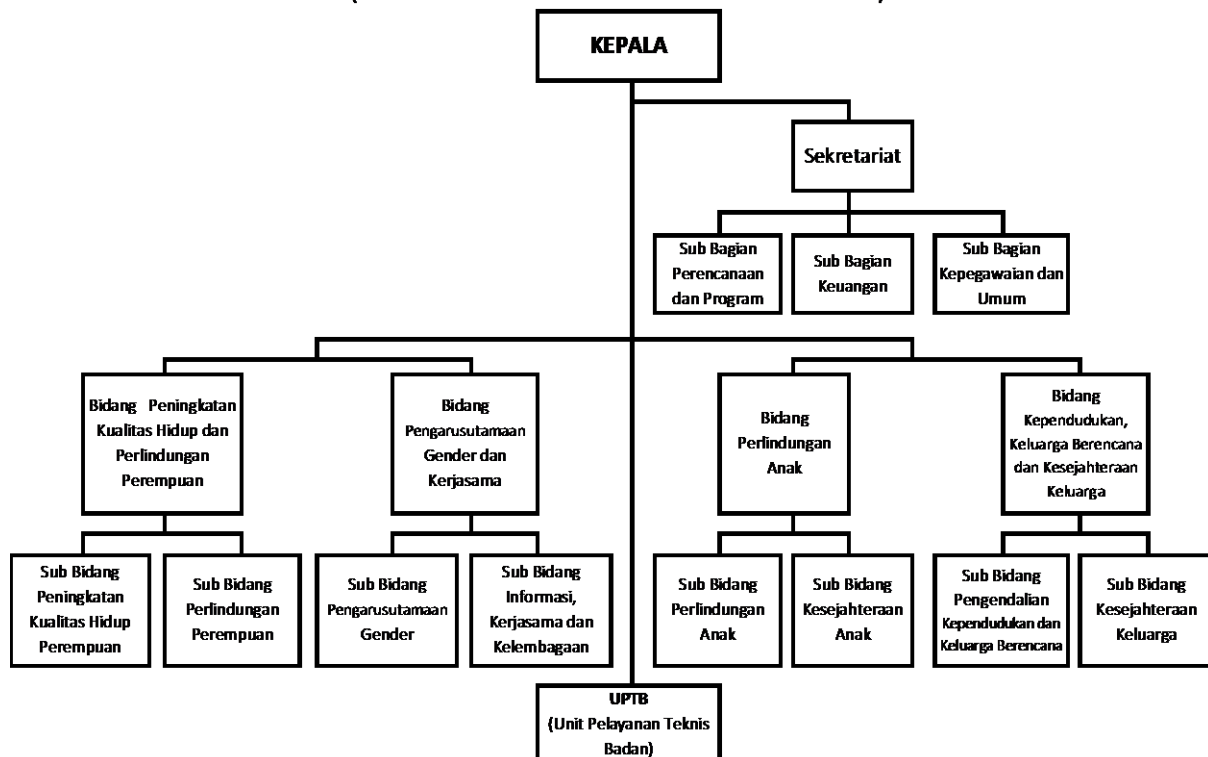
### **2.1.3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2013, maka Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu Lembaga Teknis dengan penambahan tugas baru adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan (eselon IIa)
- 2) Sekretariat (eselon IIIa) yang membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Program (eselon IVa)
  - b. Sub Bagian Keuangan (eselon IVa)
  - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum (eselon IVa)
- 3) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (eselon IIIa) yang membawahi :
  - a. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (eselon IVa)
  - b. Subbidang Perlindungan Perempuan (eselon IVa)

- 4) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama (eselon IIIa) yang membawahi :
  - a. Subbidang Pengarusutamaan Gender (eselon IVa)
  - b. Subbidang Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan (eselon IVa)
- 5) Bidang Perlindungan Anak (eselon IIIa) yang membawahi :
  - a. Subbidang Perlindungan Anak (eselon IVa)
  - b. Subbidang Kesejahteraan Anak (eselon IVa)
- 6) Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga (eselon IIIa) yang membawahi :
  - a. Subbidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (eselon IVa)
  - b. Subbidang Kesejahteraan Keluarga (eselon IVa)
- 7) Kelompok jabatan fungsional :
  - a. Perencana
  - b. Arsiparis
- 8) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

**Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat (BP3APKKB)**  
(Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2013)



## **2.2. SUMBER DAYA BP3AKB PROVINSI JAWA BARAT**

Sumber daya yang dimiliki BP3AKB meliputi sumber daya manusia, asset gedung dan tanah, mitra kerja utama yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) beserta perangkat yang ada didalamnya.

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Nomenklatur BP3AKB pada awal berdirinya adalah BPPKB yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, jumlah personil yang ditugaskan pada BPPKB saat dibentuk tanggal 9 Januari 2009, berjumlah 90 orang yang berasal dari berbagai OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari 8 orang Golongan IV; 54 orang Golongan III; 9 orang Golongan II dan 3 orang Golongan I serta 16 orang TKK (TKK yang sedang proses CPNS). Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut: 10 orang S2; 34 orang S1; 4 orang Sarjana Muda (D III); 31 orang SMA/SLTA dan sederajat; 9 orang SMP/SLTP, 2 orang lulusan SD, dan berdasarkan jenis kelamin adalah : 50 orang laki-laki dan 40 orang perempuan.

Kemudian pada akhir tahun 2010, terdapat penambahan jumlah personil menjadi 95 orang terdiri dari 9 orang Golongan IV; 61 orang Golongan III; 19 orang Golongan II dan 6 orang Golongan I. Dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut: 11 orang S2; 39 orang S1; 3 orang Sarjana Muda (D III); 31 orang SMA/SLTA dan sederajat; 8 orang SMP/SLTP, 3 orang lulusan SD, dan berdasarkan jenis kelamin adalah : 54 orang laki-laki dan 41 orang perempuan.

Pada saat perubahan nomenklatur menjadi BP3AKB tanggal 23 Januari 2013, personil sebanyak 78 orang terdiri dari 13 orang Golongan IV; 45 orang Golongan III; 18 orang Golongan II dan 2 orang Golongan I. Tingkat pendidikan : 2 orang S3; 13 orang S2; 26 orang S1; 4 orang Sarjana Muda/D3; 28 orang SMA; 3 orang SMP dan 1 orang SD.

### **2.2.2. Sumber Daya Asset/Modal**

Asset tanah BP3AKB merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat seluas 3.020 m2 dengan bangunan kantor berlantai dua seluas 710 m2. Operasional BP3AKB mulai Desember 2010 difasilitasi 9 kendaraan roda empat, 9 kendaraan roda dua serta satu buah bus (pengadaan tahun 2010). Kondisi kendaraan masih dalam keadaan baik dan bisa dipakai.

Kondisi peralatan kantor yaitu berupa komputer dan perangkatnya (printer) sebagian besar sudah dalam kondisi out of date, pengadaan baru setiap tahun jumlahnya tidak dapat mengganti perangkat lama yang sudah kurang layak. Sebagian pegawai BP3AKB harus berbagi komputer untuk melaksanakan tugas.



### **2.3. KINERJA PELAYANAN BP3AKB**

Kinerja pelayanan BP3AKB diukur berdasarkan beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat antara lain melalui pengukuran IPG (Indeks Pembangunan Gender), IDG (Indeks Pemberdayaan Gender), cakupan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, jumlah pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan serta jumlah peserta Keluarga Berencana.

Alasan Pemilihan Indikator di atas adalah :

1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG yang terdiri dari tiga komponen yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Meleak Huruf Perempuan (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, menunjukkan nilai atau kualitas hidup perempuan yang dapat dicapai. Melalui IPG dapat dilihat seberapa besar kesenjangan yang ada antara IPM dan IPG yang akan menunjukkan kesenjangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sampai saat ini, nilai IPG masih beberapa poin di bawah IPM.

2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG menunjukkan kesenjangan pembangunan dalam sektor lapangan pekerjaan dan pendapatan, dimana nilainya sampai saat ini masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, IDG terdiri dari persentase perempuan yang bekerja di parlemen, perempuan yang bekerja sebagai tenaga kerja profesional, jumlah perempuan dalam angkatan kerja serta sumbangan pendapatan perempuan yang umumnya nilainya lebih rendah dibanding laki-laki.

3) Cakupan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Menurunnya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak

Pemilihan indikator ini berdasarkan pada kondisi nyata dimana kekerasan baik secara fisik, psikologis maupun seksual, umumnya dialami perempuan dan anak-anak. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi kualitas hidup dan perkembangan hidup perempuan dan anak-anak yang akan mengakibatkan gangguan pada produktivitas perempuan dan anak-anak. Untuk mencapai pembangunan yang optimal, demi menggapai nilai IPM dan IPG yang sepadan, maka kekerasan mutlak harus dihilangkan.

4) Capaian Indeks Keluarga Berencana

Pemilihan indikator ini didasari jumlah penduduk yang semakin meningkat tajam, sedangkan daya dukung lingkungan tidak bertambah, disamping itu terdapat banyak keluarga yang sesungguhnya berada dalam kondisi kekurangan sehingga kurang/tidak mampu memfasilitasi tumbuh kembang anak dengan layak. Oleh karena itu pengendalian jumlah penduduk dan penggalakkan program keluarga

berencana yang difokuskan pada pembatasan kelahiran sangat penting untuk segera diterapkan di Jawa Barat.

Apabila dilihat dari target sasaran kinerja, sampai tahun 2013 IPG dan IDG dapat dicapai mendekati sasaran seperti tampak pada Tabel 2.1. IPG dan IDG dihitung terpusat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama dengan BPS RI karena ada beberapa faktor pengali yang menjadi pertimbangan, sedangkan pengukuran kinerja aspek Keluarga Berencana diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Pencapaian kinerja BP3AKB pada tahun 2011 sebagian melampaui target yang telah ditetapkan dimana komposit IPG yaitu Angka Harapan Hidup dan Angka Melek Huruf nilai capaiannya berada diatas target, demikian pula komposit IDG yaitu jumlah perempuan pekerja profesional dan perempuan di parlemen. Sedangkan jumlah perempuan dalam angkatan kerja masih di bawah target yang ditetapkan.

Tabel 2.1.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan BP3AKB Provinsi Jawa Barat s/d tahun 2013  
(RENSTRA periode yang lalu)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra BP3AKB Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	IPG : *	62.5	63-64	64-65	65-66	65-66	61.84	62.38	63.25	63.68	64.61	98.94	98.24	98.06	97.97	99.40
	- AHH (tahun)	69.12	69.56	70	70.44	70.88	70.05	70.25	70.25	70.46	71.02	101.35	100.99	100.36	100.03	100.20
	- AMH (%)	87.18	88.68	89.84	90.62	91.22	94.25	94.6	94.61	94.66	95.3	108.11	106.68	105.31	104.46	104.47
	- RLS (tahun)	6.86	68.85	71.16	73.8	77.4	7.41	7.63	7.64	7.65	7.69	108.02	110.82	107.36	10.37	9.94
2	IDG : *	57	58-60	61-63	64	65	55.77	67.01	68.08	68.62	67.57	97.84	113.58	109.81	107.22	103.95
	- Perempuan pekerja profesional (%)	14.08	14.27	14.46	14.65	14.74	32.47	38.01	38.19	38.76	38.44	230.61	266.36	264.04	264.57	260.79
	- Perempuan di parlemen (%)	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	14.23	24	24	24	22	119.58	201.68	201.68	201.68	184.87
	- Sumb Perempuan di ndapatan kerja (%)							27.29	27.38	27.69	28.05					
3	Menurunnya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	5%	10%	15%	25%	40%		-	-	-	-	0	-	-	-	-
4	KB : **															
	- Jumlah peserta KB baru	1.299,310	1.328.252	1328934	1343357	1343357	1,313,144	1,451,359	1236786	1705834	1014429	101.06	109.27	93.07	126.98	75.51
	- Jumlah Peserta KB aktif yang terbina	6.290.192	6.361.409	6416746	6473307	6524445	6,405,787	6,361,396	7264088	7363926	-	101.84	100.00	113.21	113.76	
	- Persentase Peserta KB Mandiri	51.23	52	53	54	55	51.23	51.16	48.19	50	49	100	98.38	90.92	92.59	89.09
	- Rata-rata usia kawin pertama wanita	18.7	18.9	19.1	19.3	19.55	18.7	18.9	18.12	18.9	18.9	100	100.00	94.87	97.93	96.68
Sumber data : *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010 - 2015																
** BKKBN Wilayah Jawa Barat 2011 - 2015 (untuk data KB)																

Untuk indikator bidang keluarga berencana, pada umumnya telah dapat dicapai sesuai target, dan ada pula yang melampaui target yang ditetapkan, seperti jumlah peserta KB baru dan KB Mandiri.

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) selama 5 (lima) tahun terakhir adalah seperti pada Tabel 2.2.

Rasio realisasi anggaran program-program pembangunan BP3AKB Provinsi Jawa Barat pada dua tahun waktu kajian berkisar antara 79% - 97%, artinya kinerja penyerapan dan pelaksanaan anggaran dapat dikategorikan baik, masing-masing rasio realisasi dan rencana anggaran pada tahun 2011 dan 2012 adalah :

- Untuk Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam Pembangunan sebesar 94.61% dan 92.75%
- Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak sebesar 91.05% dan 89.14%
- Program Keluarga Berencana sebesar 96.71% dan 94.73%.

Hal-hal yang menjadi penghambat kesempurnaan penyerapan anggaran adalah adanya kondisi yang sulit diprediksi untuk pelaksanaan pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) terutama menyangkut penanganan dan pencegahan trafficking. Alokasi anggaran tidak terserap seluruhnya khususnya untuk sub kegiatan pemulangan korban trafficking, karena para pelaku perdagangan orang tampaknya semakin hati-hati, sehingga semakin sulit untuk dilacak. Disamping itu adanya mekanisme yang berbeda antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi lain tempat keberadaan korban sehingga tidak siap untuk proses pemulangan. Pada tahun 2010, sekitar 30% anggaran pemulangan korban tidak dapat diserap karena prediksi pemulangan ternyata pada pelaksanaannya tidak mencapai target, atau hanya sedikit korban yang dapat dipulangkan.

Tabel 2.2.  
Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Pelayanan BP3APKKB (BP3PKB)  
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013

NO	Uraian Bidang/ Program	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran
		1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	
	Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak																
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak																
A																	
1	Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menjadi Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKS)	1.143.000.000	363.000.000	400.000.000	570.000.000	592.850.000	951.544.000	362.800.000	399.740.000	569.555.000		83,25	99,94	99,94	99,92		-2,89
2	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	895.000.000	929.000.000	950.000.000	940.000.000	732.810.000	774.459.500		927.900.000	932.505.000		86,53		97,61	99,20		15,20
3	Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANEM)	770.000.000	250.000.000				775.397.000	232.427.500				94,21					
4	Kegiatan Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak	246.845.000					226.798.875					91,88					
5	Kegiatan Fasilitas Perlindungan dan Penanganan Korban Trafficking (Pembentukan Gugus Tugas)	500.000.000					333.146.270					66,63					
6	Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pemberantasan Bura Akara Perempuan (PKAP)	400.000.000					377.720.000					94,43					
7	Kegiatan Fasilitas dan Advokasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRKT)	400.000.000	635.050.000				324.529.725					81,13					
8	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu	400.000.000					358.394.000	525.793.900				89,60	82,80				
9	Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P21P2A)	400.000.000					177.664.600					44,42					
10	Kegiatan Fasilitas Usaha Kerajinan Perempuan	350.000.000				605.000.000	304.459.000		310.787.152	685.995.000		86,99		97,64	89,70		
11	Kegiatan Fasilitas Perlindungan Pekerja Anak (2013 perlindungan anak)	250.000.000				700.000.000	228.980.000					91,59					
12	Kegiatan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMAT-AS)	250.000.000					236.300.000					94,52					
13	Kegiatan Fasilitas Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dari Aksi Pemogran dan Pomo Aksi	300.000.000					258.384.320					86,13					
14	Kegiatan Pencegahan, Penanganan, Perlindungan Korban Trafficking		3.141.460.000					2.089.743.840				66,51					
15	Fasilitas Penguatan Organisasi Perempuan di Bidang Ekonomi, Budaya, Sosial, dan Lingkungan																
16	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Perlindungan Hari Anak Nasional		358.000.000	148.902.500	91.197.000	100.000.000		290.958.500	144.852.500	81.797.000			81,27	97,28	89,69		
17	Kegiatan Model Kota/Desa/Kecamatan Layak Anak		260.500.000					241.143.150					92,57				
18	Kegiatan Fasilitas Peningkatan dan Pengembangan Kreativitas dan Pemahaman Hak Partisipasi Anak			351.694.000	1.564.015.000	1.120.000.000			321.371.000					91,28			
19	Fasilitas Perlindungan Perempuan dan Anak			356.482.500					336.982.500					94,53			
20	Pelatihan Pendamping Perlindungan Perempuan dan Anak (PA)				318.838.575					313.345.000					98,28		
21	Pembinaan Organisasi Perempuan			723.952.000					221.032.000						98,70		
22	Peningkatan Hari Nasional Perempuan (2010) Kegiatan Penyediaan Hari Bu Inggris Jawa Barat )		440.000.000	432.000.000	500.000.000	500.000.000		402.825.000	411.385.000	498.600.000			91,55	95,23	99,72		
23	Perlindungan Perempuan (Trafficking, KDRKT, dan Pemogran)			1.630.000.000	1.367.438.470	1.161.480.000			1.231.386.630	1.061.385.970				75,55	77,62		
24	Penyediaan Koneksi Perempuan dan Anak			2.000.000.000					1.862.269.870					93,11			
25	Kegiatan Koneksi Politik Perempuan Indonesia (fasilitasi KPP)	650.000.000		936.025.000	1.047.456.350	231.000.000	604.993.600		891.891.000	896.238.050		93,08		95,28	85,56		
26	Kampanye Jawa Barat Bebas Trafficking			113.400.000					108.000.000					95,24			
27	Pembentukan Forum Anak Daerah dan KIE			400.000.000					370.500.000					92,63			
28	Penggiatan Jejaring Perempuan Membangun Sektor UMKM			650.000.000					575.805.000					88,59			
29	Fasilitas Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)					2.000.000.000											

NO	Uraian Bidang/ Program	ANGSARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
B	Program Peningkatan Peran Serta dan Keterampilan Gender Dalam Pembangunan																
1	Kegiatan Peningkatan Pengarusutamaan Gender melalui Forum Komunitas se Jawa Barat	200.000.000					172.219.000					86,11					
2	Penyusunan Data Gender dan Anak				418.053.050											95,06	
3	Jepang Kelambangan dan Kejasama Potensi Jawa Barat				242.169.400	1.000.000.000										95,52	
4	Gerakan Pengarusutamaan Gender				1.623.099.990	1.700.000.000										91,74	
5	Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	250.000.000					148.983.450					59,59					
6	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan di Jawa Barat	400.000.000					369.459.250					92,36					
7	Fasilitasi Pengembangan Organisasi Perempuan di Jawa Barat			133.360.000													
8	Pengajian Jejaring Pengarusutamaan Gender			463.394.000													
9	Sosialisasi dan Pelatihan Responsif Gender bagi OPD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota			793.267.625													
10	Pendampingan Penerapan Anggaran Responsif Gender bagi OPD Provinsi Jawa Barat dan Sosialisasi Gender bagi Sewa & 6 Kabupaten/Kota			515.000.000													
11	Kegiatan Koordinasi dan Pelatihan Peningkatan Usaha Ekonomi Mikro (UEM) Berbasis Rumah Tangga	500.000.000					457.539.975					91,51					
12	Kegiatan Penguatan Potensi Harta Bani dan Harta Keluarga Nasional (HARGANAS)	345.000.000					314.649.375					91,20					
13	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Harta Bani dan Harta Keluarga Nasional (HARGANAS)	350.000.000					170.091.375					48,60					
14	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Responsif Gender bagi Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi Jawa Barat	200.000.000					170.955.000					85,48					
15	Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Melalui Media Elektronik	1.099.500.000						1.075.306.000				97,80					
C	Bidang KB dan IKS																
	Program Keluarga Berencana																
1	Kegiatan Pembentukan Komitmen Pengadopsi Kegiatan Pengas Pembantu Keluarga Berencana (PK-AB)	389.522.000					361.669.600					92,85					
2	Kegiatan Peningkatan Kesetaraan Ber KB	9.980.279.200	1.138.870.000	942.866.303	1.157.473.050	240.000.000	9.282.795.030	1.021.898.625	898.662.600			93,01	89,73	95,31			
3	Kegiatan Keluarga Berencana	520.006.400			1.536.371.649	828.000.000	160.344.400					30,84				90,63	
4	Kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	747.042.400	342.400.000	493.760.000	1.086.120.097	920.000.000	578.206.000	322.776.250	482.526.000	1.052.540.000		77,40	94,25	97,72	96,31		
5	Kegiatan Peningkatan Perencanaan Program Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat																
6	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Harta Keluarga Nasional (HARGANAS)		400.000.000														
7	Kerjasama Keluarga dan Harta Nasional			449.106.000													
8	Bakti Sosial Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin			800.000.000													
9	Operasional Generasi Berencana			765.000.000													
10	Gerakan Ekonomi Perempuan melalui Keluarga Sejahtera			577.450.000													
C																	
	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan																
1	Sosialisasi dan Promosi Kependudukan					400.000.000											
D	Program Perencanaan Pengendalian dan Pengembangan Pembangunan Daerah																
1	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan					400.000.000											

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BP3AKB**

Menyimak demikian banyaknya kasus yang muncul ke permukaan dewasa ini, khususnya kasus-kasus KDRT, paedofil, trafficking, pekerja anak, penelantaran anak, anak-anak jalanan, juga tingginya laju pertumbuhan penduduk (LPP). Justru jumlah kasus yang mencuat semakin banyak karena semakin lama semakin banyak dilaporkan. Hal ini merupakan tantangan dalam pelayanan BP3AKB.

Berbagai kasus yang cenderung meningkat, baik secara fakta di lapangan maupun karena semakin meningkatnya kesadaran untuk “melapor”, memerlukan penanganan yang terpadu, holistik antar berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah dan masyarakat. BP3AKB harus dapat menjembatani atau melakukan fasilitasi koordinasi berbagai pihak agar dapat saling berbagi peran, tugas, dan fungsi di masyarakat untuk mengatasi, minimal untuk mengurangi kasus-kasus tersebut.

Disamping itu, pengembangan kelembagaan dimana satu bidang kewenangan yaitu pengendalian kependudukan ditambahkan ke dalam tugas dan kewenangan BPPKB sehingga menjadi BP3AKB, merupakan tantangan lain, menambah kompleks permasalahan yang harus ditangani. Penanganan berbagai tantangan ini memerlukan upaya sinergis dan terpadu serta bukan merupakan tugas yang mudah.

Di sisi lain, salah satu peluang penting yang merupakan kekuatan BP3AKB adalah sudah terjalinnya kerjasama dengan berbagai lembaga lain yang terkait dengan penanganan pelayanan BP3AKB, dengan kabupaten dan kota, serta dengan Pemerintah Provinsi lain diluar Provinsi Jawa Barat.

Salah satu upaya internal penanganan untuk korban kasus-kasus KDRT, paedofil trafficking, penelantaran anak, BP3AKB Provinsi Jawa Barat telah menyokong pembentukan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) dengan sekretariat di Jl. Riau No. 2 Bandung. Di lembaga ini ditempatkan petugas dari berbagai bidang yang dibutuhkan untuk menangani para korban. Sejak tahun 2009 yaitu sejak berdirinya BP3AKB Provinsi Jawa Barat dengan nomenklatur BPPKB sampai dengan akhir 2012, melalui kerjasama BP3AKB dengan P2TP2A dan berbagai pihak terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Korban Trafficking, telah berhasil dipulangkan 198 orang TKW korban trafficking.

Tabel 2.3.

Komparasi Capaian Sasaran Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Barat Terhadap  
Sasaran Renstra Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BP3AKB 2011	Sasaran Renstra pada Renstra BP3AKB Kab/Kota * 2011	Sasaran pada Renstra Kementerian 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IPG	63.25	68.26	67.80
	- AHH	70.25	71.06	71.69
	- AMH	94.61	98.50	90.55
	- RLS	7.64	8.18	7.54
2	IDG	68.08	66.11	69.14
	- Perempuan pekerja professional	38.18	31.58	45.75
	- Perempuan di parlemen	24.0	20.0	17.49
	- Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	27.38	31.51	34.16
3	KB			
	- Jumlah peserta KB baru	1.236.786 (105.6%)	542,758 (83.42%)	9,581,469 (110.7%)
	- Jumlah Peserta KB aktif yang terbina	7.264.088 (76,61%)	517.007 (81,02 %)	
	- Rata-rata usia kawin pertama wanita	18.90	19.20	

Sumber : \* Kabupaten Bandung Tahun 2011

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BP3AKB

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BP3AKB, dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi, baik dari faktor internal maupun eksternal.

Tabel 3.1a.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BP3AKB  
Provinsi Jawa Barat

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini (2013)	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BP3AKB
			Internal (Kewenangan BP3AKB)	Eksternal (Diluar Kewenangan BP3AKB)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aspek Tupoksi	Struktur organisasi belum efektif meningkatkan kontribusi penanganan masalah PPKB	Makin berkembangnya masalah PPKB	Kompetensi dan jumlah SDM masih belum memadai	Dukungan masyarakat terhadap penanganan masalah PPKB masih rendah	Intensitas pelayanan baik berupa penanganan maupun sosialisasi belum optimal
	Pemahaman akan tupoksi belum merata	Sebagian pegawai tidak menyelesaikan pekerjaannya	Kualitas SDM sebagian pegawai masih rendah	Penempatan pegawai atau penerimaan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan	Rendahnya kualitas pelayanan
	Adanya perubahan struktur organisasi berupa penambahan kewenangan (mulai tahun 2013)	Terbitnya Pergub baru (nomor 6 tahun 2013)	Efektivitas pembagian tugas pada setiap pegawai	Kurangnya pasokan pegawai seiring bertambahnya kewenangan	Rendahnya kualitas pelayanan
	Rendahnya pemahaman tupoksi pada sebagian pegawai	Prioritas pelaksanaan berorientasi kegiatan/ proyek	Pembinaan dan transfer wawasan antar pegawai terutama secara hierarki	Pemberian bimtek	Tidak lengkapnya penyediaan materi rutin seperti : laporan dan data
	Kurangnya koordinasi antar unit	Jadual dan materi kegiatan tumpang tindih	Penataan jadual, materi antar bidang	Jadual dan materi kegiatan OPD lain	Tumpang tindihnya kegiatan, baik dalam segi materi, jadual, kunjungan lapangan
	Kurangnya kuantitas pegawai	Jumlah pegawai hanya 78 orang menangani 3 urusan wajib	Permohonan penambahan pegawai yang kapabel	Penempatan pegawai	Rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan

Struktur organisasi yang saat ini ada, belum efektif meningkatkan kontribusi penanganan masalah PPKB (pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana). Hal ini tampak dari makin berkembangnya masalah-masalah PPKB. Faktor internal yang mempengaruhi belum efektifnya penanganan masalah adalah masih rendahnya



kualitas atau kemampuan sebagian pegawai PPKB. Sedangkan faktor eksternal adalah masih kurangnya dukungan masyarakat terhadap penanganan kasus-kasus PPKB.

Pemahaman akan tupoksi belum merata yang ditandai dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan pegawai. Faktor internal yang mempengaruhi adalah rendahnya kualitas sebagian pegawai sehingga tidak mampu atau tidak mengerti akan tugas pokoknya, sedangkan faktor eksternalnya adalah kurang sesuainya kompetensi yang dimiliki pegawai sehingga tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada di BP3AKB. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan BP3AKB.

Adanya perubahan struktur organisasi berupa penambahan kewenangan (mulai tahun 2013) memunculkan tugas pokok baru, sedangkan jumlah pegawai tidak ditambah. Perubahan struktur organisasi seiring dengan terbitnya Pergub Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2013.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan BP3AKB untuk mencapai target sasaran pembangunan secara internal adalah masih kurangnya intensitas dan jangkauan sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi berbagai aspek pelayanan dengan lembaga terkait, baik di pemerintahan maupun non pemerintah dan swasta.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi capaian IPG adalah kualitas dan jangkauan pelayanan OPD terkait seperti misalnya aspek pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk pencapaian IDG, dipengaruhi oleh faktor eksternal masih kurangnya dukungan atau kepedulian lembaga terkait seperti misalnya parpol, sektor swasta (dunia usaha), serta pelaku ekonomi.

### **3.1.2. Aspek Keuangan**

Permasalahan yang dihadapi dalam aspek keuangan adalah :

Alokasi anggaran yang dikelola BP3AKB masih belum memadai untuk menangani seluruh masalah yang ada dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana. Hal ini terlihat dari adanya realisasi anggaran yang tertera dalam DPA berada jauh di bawah nilai alokasi anggaran yang diusulkan semula dalam RKA. Namun kondisi ini sangat dimaklumi karena SDM pengelola program/kegiatan di BP3AKB juga jumlah dan kualitasnya tidak memadai, sedangkan disisi lain juga anggaran yang dapat disediakan pemerintah sangat terbatas.

Tabel 3.1b.

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BP3AKB  
Provinsi Jawa Barat**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini (2013)	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BP3AKB
			Internal (Kewenangan BP3AKB)	Eksternal (Diluar Kewenangan BP3AKB)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aspek Keuangan	Alokasi anggaran masih kurang memadai untuk penanganan seluruh masalah	Nilai DPA dibawah usulan RKA awal	Kurangnya SDM pengelola	Keterbatasan dana yang tersedia	Intensitas pelayanan baik berupa penanganan maupun sosialisasi belum optimal
	Penyampaian DPA Perubahan terlambat	Pelaksanaan kegiatan perubahan hanya dalam dua bulan harus selesai (Pengesahan Perda Perubahan pada Bulan Oktober)	Pengajuan usulan perubahan dipercepat dan meminimalkan usulan perubahan	Mempercepat realisasi anggaran perubahan	Intensitas pelayanan baik berupa penanganan maupun sosialisasi belum optimal

### 3.1.3. Aspek Sarana Prasarana

Permasalahan yang dihadapi dalam aspek sarana dan prasarana adalah :

Kondisi sarana dan prasarana terutama komputer dan perangkatnya sudah banyak yang tidak layak pakai dan hanya terpaksa saja digunakan dengan kualitas hasil kerja yang kurang memadai. Pada umumnya komputer dan perangkat yang sudah tidak layak ini merupakan pengadaan lebih dari lima tahun lalu, malah sebagian merupakan peninggalan OPD yang lama yaitu Balitbangda, sehingga BP3AKB terus berupaya mengajukan usulan pengadaan baru.

Tabel 3.1c.

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BP3AKB  
Provinsi Jawa Barat**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini (2013)	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BP3AKB
			Internal (Kewenangan BP3AKB)	Eksternal (Diluar Kewenangan BP3AKB)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aspek Sarana Prasarana	Kondisi sarana prasarana terutama komputer sudah banyak yang tidak layak pakai	Pengadaan sarana prasarana komputer sebagian besar lebih dari 5 tahun	Pengajuan pengadaan baru	Persetujuan pengadaan sarana prasarana komputer baru	Intensitas pelayanan dan kelancaran administrasi belum optimal
	Belum tersedia kendaraan operasional yang siap guna terutama oleh pelaksana yang harus menangani kondisi darurat	Jumlah kendaraan operasional terbatas pada jumlah pejabat struktural	Pengajuan kendaraan tambahan	Persetujuan pengadaan kendaraan operasional	kelancaran pelayanan kurang optimal

Sarana dan prasarana lain yang dirasakan masih sangat kurang adalah kendaraan operasional yang siap dipergunakan disaat kejadian darurat yang mendesak untuk diatasi. Kendaraan yang saat ini tersedia, dipersiapkan untuk fasilitasi operasional pejabat struktural. Untuk itu BP3AKB terus mengupayakan pengadaan kendaraan tambahan.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Visi Jawa Barat yang ditetapkan sesuai RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 adalah :

***"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"***

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**Maju** : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

**Sejahtera** : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

**Untuk Semua** : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi Pertama, ***Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing.*** Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.

Misi Kedua, ***Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.*** Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Misi Ketiga, ***Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik.*** Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota.

Misi Keempat, ***Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan.*** Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

Misi Kelima, ***Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.*** Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.

BP3AKB dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berperan dalam mengemban pencapaian Misi 1 dan 5, yaitu :

- ikut serta Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing melalui upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, pembinaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga sekaligus melakukan pendataan pertumbuhan penduduk baik melalui kelahiran maupun in-migrasi
- ikut serta Meningkatkan kehidupan sosial, melalui pembangunan yang setara gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak, karena berdasarkan data faktual, capaian IPM untuk perempuan masih rendah dibanding laki-laki, sehingga dengan mendorong dan menegakkan pembangunan yang setara gender, akan meningkatkan IPM secara konsisten dan meluas tidak hanya untuk pihak perempuan (ibu) tapi ikut menyangkut kesejahteraan anak-anak.

Faktor-faktor yang merupakan penghambat dalam pelaksanaan tugas ini umumnya adalah adanya keterbatasan jumlah dan kualitas SDM dan juga dana. Sedangkan faktor pendorongnya adalah sudah berlangsungnya kerjasama dengan berbagai lembaga lain, baik didalam pemerintahan maupun non pemerintah, yang sampai saat ini terus konsisten dalam misinya, disamping itu bantuan lembaga-lembaga non pemerintah sejak bertahun-tahun yang lalu, merupakan faktor pendorong yang sangat penting bagi penyelenggaraan tugas BP3AKB Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.2.  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BP3AKB  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Visi : "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan BP3AKB	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 <i>Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing</i>			
	- Program Pelayanan Keluarga Berencana	LPP masih tinggi Pelayanan dan sosialisasi kurang optimal	Keterbatasan dana dan SDM	Kerjasama dengan lembaga lain Dukungan masyarakat
	- Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	Tingginya jumlah pernikahan dini Pelayanan dan sosialisasi kurang optimal	Keterbatasan dana dan SDM Tradisi sebagian masyarakat	Adanya PIK-KRR Kerjasama dengan lembaga lain
	- Program Peningkatan Peran Serta Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Pemahaman PUG masih rendah	Keterbatasan dana dan SDM	Peraturan Daerah
	- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pelayanan dan sosialisasi belum optimal Kasus KDRT dan trafficking meningkat	Keterbatasan dana dan SDM Budaya patriarki	Kerjasama dengan lembaga lain Peraturan Daerah
	- Program Ketahanan Keluarga	Pelayanan dan sosialisasi belum optimal	Keterbatasan dana dan SDM	Kerjasama dengan lembaga lain Bantuan sosial
2	Misi 2 Membangun Perkonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan	-	-	-
3	Misi 3 Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik	-	-	-
	- Program Penataan Kependudukan	Pendataan kurang lengkap	Keterbatasan dana dan SDM Tingginya Urbanisasi	Kerjasama dengan lembaga lain
4	Misi 4 Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan	-	-	-
5	Misi 5 <i>Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal</i>	-	-	-

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, Telaahan Renstra Kabupaten/Kota dan Renstra Provinsi**

Renstra tingkat nasional yang juga menjadi acuan kinerja BP3AKB adalah Renstra Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta BKKBN.

Dalam penjelasan mengenai rencana strategis KPPPA, dikemukakan bahwa prinsip-prinsip dasar pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- Hak asasi perempuan dan hak anak merupakan bagian integral dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara (Sesuai dengan CEDAW dan CRC)
- Hak Perempuan antara lain: akses, partisipasi dan kontrol serta manfaat yang sama dengan laki-laki di bidang-bidang a.l: hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya, dalam keluarga, di perdesaan
- Hak Dasar Anak adalah :
  - Hak Hidup yg meliputi: Hak mendapatkan identitas diri dan status kewarganegaraan; hak utk mendapatkan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani; hak utk ibadah
  - Hak Tumbuh dan Berkembang meliputi: Hak utk mendapatkan pemenuhan gizi yg seimbang; hak utk beristirahat dan memanfaatkan wkt luang, berkreasi dan bergaul; hak utk mendapatkan pendidikan
- Hak Mendapatkan Perlindungan meliputi: perlindungan dari tindakan eksploitasi; penelantaran; kekerasan dan penganiayaan dan perlakuan salah lainnya
- Hak Berpartisipasi meliputi: Hak utk menyatakan dan didengar pendapatnya; hak mendapat, mencari dan memberikan informasi sesuai dg tingkat kecerdasan dan usianya.

Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan BP3AKB yang pada awalnya mengacu pada tugas dan kewenangan KPPPA, kebijakan di tingkat nasional untuk Bidang PPPA terkait sistem perlindungan perempuan dan anak adalah :

- Penyusunan Kebijakan (termasuk peraturan perundang-undangan) PP dan PA dan Kesetaraan gender;
- Ketersediaan Data terpilah dan pemanfaatannya dalam perencanaan;
- Program-program Pencegahan, Kuratif dan Rehabilitatif serta Repressif
- Dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antar elemen di pusat dan daerah

Visi dan Misi KPPPA adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Misi :

- a. Mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- b. Memantapkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
- d. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

Tujuan dari pembangunan Pemberdayaan Perempuan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
- b. Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Tujuan dari pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Indonesia adalah:

- a. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak
- b. Perlindungan anak dari segala bentuk perlakuan salah, kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak

Sasaran :

- a. Menyusun dan mengembangkan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota

- b. Meningkatkan pendataan, pemantauan, dan evaluasi yang mendukung penyelenggaraan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota
- c. Meningkatkan kemitraan dan kapasitas pelaksana pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
  - d. Menyusun dan mengembangkan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang mendukung pemenuhan hak-hak anak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota
  - e. Meningkatkan pendataan, pemantauan, dan evaluasi yang mendukung pemenuhan hak-hak anak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota
  - f. Meningkatkan kemitraan dan kapasitas pelaksana pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak

Di tingkat nasional, KPPPA mengemban pelaksanaan program-program :

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan perempuan

Program Perlindungan Anak

Program Dukungan Manajemen

Selaras dengan kebijakan pembangunan tingkat nasional, BP3AKB Provinsi Jawa Barat menjabarkan sasaran nasional dengan melaksanakan sasaran-sasaran operasional didukung program dan kebijakan yang terkait dengan program nasional, yaitu :

- Program Peningkatan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Selanjutnya untuk kewenangan Bidang Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan, yang ditingkat nasional diemban BKKBN, dapat dikemukakan kebijakan dalam Rencana Strategis BKKBN sebagai berikut.

Tiga Fokus Prioritas kinerja BKKBN adalah :

- 1) Revitalisasi Program KB, melalui: (a) peningkatan kapasitas kelembagaan program KB; (b) peningkatan promosi KB; (c) peningkatan kemitraan dan pergerakan masyarakat; (d) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana program KB; dan (e) pengembangan sistem informasi program KB.
- 2) Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk, melalui : (a) penyediaan peraturan perundangan pengendalian penduduk; (b) perumusan kebijakan



kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas; dan (c) penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait.

- 3) Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Data Dan Informasi Kependudukan Yang Memadai, Akurat Dan Tepat Waktu, melalui : (a) penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan; (b) penyediaan hasil kajian kependudukan sampai dengan tingkat kabupaten/kota; dan (c) peningkatan cakupan registrasi vital.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan BP3AKB Provinsi Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan BP3AKB Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyusun dan mengembangkan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak-hak anak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota	Sudah tersedia peraturan di tingkat provinsi namun belum lengkap		✓
2	Meningkatkan pendataan, pemantauan, dan evaluasi yang mendukung penyelenggaraan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak-hak anak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota	Masih lemahnya data Belum diterapkannya anggaran dan pembangunan berbasis gender secara meluas	✓	
3	Meningkatkan kemitraan dan kapasitas pelaksana pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak	Sudah terjalin kemitraan dengan sebagian lembaga terkait		✓
4	Meningkatnya IPM dan IPG didukung NRR = 1,0	IPG masih timpang dibanding IPM	✓	
5	Makin kuatnya jati diri dan karakter bangsa	Kebebasan informasi melunturkan jati diri dan karakter bangsa	✓	

Sasaran pembangunan Bidang Keluarga Berencana secara umum adalah "Meningkatnya kualitas sumber daya manusia" yang ditandai dengan :

- meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG), didukung dengan menurunnya *Net Reproduction Rate* (NRR) = 1,0
- makin kuatnya jati diri dan karakter bangsa.

Dikaitkan dengan Renstra kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, permasalahan yang umumnya dihadapi dalam pelayanan OPD di kabupaten dan kota adalah pelayanan yang kurang optimal. Yang menjadi faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya (dana, SDM, prasarana), sedangkan faktor pendorong adalah adanya kerjasama dengan lembaga lain.

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan BP3AKB Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra BP3AKB Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BP3AKB Kabupaten/kota	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terwujudnya pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan	Pelayanan kurang optimal	Keterbatasan sumber daya	Kerjasama dengan lembaga lain
	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Pelayanan kurang optimal	Keterbatasan sumber daya	
	Terwujudnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Pelayanan kurang optimal	Keterbatasan sumber daya	
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan penyebaran penduduk	Pelayanan kurang optimal	Keterbatasan sumber daya	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Pelayanan kurang optimal	Keterbatasan sumber daya	

Sumber : Renstra BPMKB Kabupaten Tasikmalaya

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Jika dikaitkan dengan kebijakan penataan ruang sebagaimana disarankan untuk dicantumkan dalam sistematika baru, pembangunan pemberdayaan perempuan dan KB tidak memiliki kaitan langsung. Namun jelas dipahami bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana untuk sementara ini dilakukan hampir merata di seluruh daerah, tidak ditentukan oleh perbedaan tata ruang. Namun ke depan akan ditekankan pada wilayah/daerah yang masih memiliki penduduk miskin dengan angka IPG dan IDG yang lebih rendah dibanding daerah lainnya.

Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) merupakan pembangunan yang bersifat menyeluruh untuk masyarakat se Jawa Barat tanpa melihat batasan daerah kota ataupun desa, kaya dan miskin, dimanapun masyarakat berada merupakan subyek dan obyek garapan pembangunan PPKB.

Demikian pula halnya dengan aspek kajian lingkungan hidup, pembangunan PPKB merupakan pembangunan yang tidak menyentuh aspek lingkungan hidup secara langsung, terkecuali jika hasil pembangunan PPKB yang notabene subyek/obyeknya adalah perempuan dan juga anak, akan menghasilkan manusia yang peduli akan lingkungannya.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis ditetapkan berdasarkan penyelenggaraan Forum OPD, monev lapangan, kajian mass media, kajian kasus yang dilaporkan

Berdasarkan berbagai permasalahan, potensi dan kondisi yang ada, terdapat banyak isu strategis dalam pembangunan bidang PPKB, diantaranya :

- 1) Rendahnya indeks pembangunan perempuan (IPG) terutama dibandingkan dengan IPM. IPM tahun 2012 adalah 73,19 dan tahun 2011 adalah 72,82, sedangkan IPG tahun 2011 adalah 63,25. Kesenjangan antara IPM dan IPG Jawa Barat hampir mencapai dua digit yaitu 9,57. Bahkan diantara provinsi se Indonesia, IPG Jawa Barat menduduki peringkat 25 diantara 33 provinsi, hanya berada diatas Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Papua Barat, Gorontalo dan NTB. Analisis dari masing-masing komponen IPG menunjukkan beberapa hal pokok di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Data Profil Perempuan Tahun 2011 (KPPPA) menunjukkan bahwa, penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah jumlahnya lebih dari dua kali lipat penduduk laki-laki (2,02 persen berbanding 5,23 persen).

Dari aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup perempuan memang lebih tinggi, akan tetapi pada sisi lain, angka kematian ibu hamil dan melahirkan (AKI) masih tinggi yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, prevalensi anemia pada ibu hamil masih lebih dari 50%.

- 2) Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih relatif rendah yaitu 41,37 persen (Sakernas 2010), dibandingkan dengan laki-laki yang dua kali lipatnya (82,84 persen). TPAK total Jawa Barat tahun 2010 sebesar 62,38 persen.

TPAK Jawa Barat berkisar pada persentase 62,89 persen di tahun 2009 dan 62,38 persen di tahun 2010. TPAK di atas 60 persen ini dapat diartikan bahwa lebih dari 60 persen Jawa Barat yang berada pada usia kerja telah berpartisipasi dalam dunia kerja, baik yang memang secara aktif bekerja,

maupun yang saat ini sementara tidak bekerja karena sesuatu hal, dan yang sedang mencari pekerjaan. Secara empiris, masih terdapat perbedaan jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan Jawa Barat. Akibatnya TPAK perempuan selalu lebih kecil dibandingkan TPAK laki-laki. Jumlah angkatan kerja laki-laki dalam dua tahun terakhir masih berada pada kisaran lebih dari dua kalinya jumlah angkatan kerja perempuan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam pangsa pasar kerja jauh lebih besar dibandingkan perempuan.

Perbedaan komposisi angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Jawa Barat dapat dimaklumi, karena norma yang terbangun di tengah masyarakat mengarahkan laki-laki memegang peranan kunci sebagai pencari nafkah utama rumah tangga. Perempuan memegang peranan sebagai pendamping suami, mengurus keperluan rumah tangga dan keluarga. Pengarahan peran ini mendudukan perempuan menjadi '*second place*', jauh berbeda dengan keadaan di negara-negara maju, di mana perempuan memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam angkatan kerja.

- 3) Partisipasi di bidang publik, meskipun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Namun hasil Pemilu 2009 masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yaitu keterwakilan perempuan di DPR hanya 24 persen (data Komisi Pemilihan Umum). Di bidang eksekutif, pada tahun 2010, dari jumlah PNS 15.003 orang, 70,55 % (10.585 orang) adalah laki-laki dan perempuan hanya 29,45 % (4.418 orang). Eselon II sebanyak 123 orang meliputi 114 orang laki-laki 9 orang perempuan (7,32%) serta Eselon III sebanyak 1.072 orang yang terdiri dari 867 orang laki-laki dan 205 orang perempuan (19,12%) sedangkan Eselon IV sebanyak 4.642 orang yang meliputi 3.501 orang laki-laki dan 1.141 orang perempuan (24,58%).
- 4) Walaupun HDI merupakan ukuran kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup perempuan juga ditentukan oleh ada tidaknya masalah lain yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi HDI. Tindak kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, walaupun belum ada angka-angka yang tepat tentang hal ini. Laporan dari beberapa lembaga yang menangani korban tindak kekerasan menunjukkan adanya kenaikan jumlah kasus, yang juga menunjukkan semakin terungkapnya tindak kekerasan di masyarakat. Menurut data tahun 2010 yang terdata oleh BP3AKB Jawa Barat, jumlah

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat ada sebanyak 1.291 kasus. Mengingat Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, sepertinya jumlah kasus tersebut belum semuanya terdata. Ini bisa terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada kekerasan dalam rumah tangga yang dialami. Mungkin juga karena tidak tahu harus melapor kemana. Atau bisa juga persepsi masyarakat yang menganggap masalah KDRT ini sebagai masalah pribadi rumahtangga yang tidak perlu ikut campur dari orang lain apalagi dilaporkan. Sehingga kebanyakan korban KDRT tidak berani bicara secara terbuka dimungkinkan karena terbentur masalah air, biaya dan waktu. Masalah lain yang dihadapi adalah maraknya perdagangan perempuan dan anak serta masalah eksploitasi termasuk pornografi dan pornoaksi. Selain itu masalah perempuan di daerah konflik dan bencana, penduduk perempuan usia lanjut dan penyandang cacat serta remaja memerlukan perhatian dan hak-hak azasi mereka harus dilindungi.

- 5) Permasalahan rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan. Angka yang menjadi basis bagi pengambilan keputusan, penyusunan program dan pembuatan kebijakan, tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan, program dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.
- 6) Kualitas hidup anak Indonesia juga masih rendah. Upaya pemerintah yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Data Sakernas 2010 memperkirakan ada 354.249 orang anak usia 10-17 tahun berpartisipasi dalam dunia kerja.

Permasalahan kasus kekerasan terhadap anak semakin banyak terjadi. Tidak hanya dihadapi oleh keluarga menengah ke bawah, tapi juga terjadi pada keluarga menengah ke atas. Meski banyak kalangan melihat, kekerasan terhadap anak berkaitan erat dengan permasalahan factor ekonomi dan kekurangpahaman orangtua mau pun anggota keluarga yang lebih tua terhadap kebutuhan/kondisi psikologi perkembangan anak. Factor kedua sangat dekat dengan masalah wawasan dan pendidikan orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua yang cenderung kurang/rendah.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat menghimpun data ada sebanyak 806.413 anak di bawah 18 tahun di Jawa Barat sepanjang tahun

2009 mengalami tindak kekerasan. Jumlahnya sebesar 53.670 adalah balita terlantar, 330.461 anak terlantar, 20.826 anak jalanan, 25.097 anak cacat, 23.495 anak nakal dan korban napza, 1.676 anak korban kekerasan, dan 351.189 adalah pekerja anak. Beberapa faktor yang diperkirakan menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, kurangnya lapangan usaha, pengaruh film di televisi, hingga pergaulan dan status sosial.

- 7) Persoalan lain adalah banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap perdagangan orang. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kebutuhan tumbuh-kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan masih rendah.
- 8) Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan. Demikian pula pemahaman akan pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa masih harus ditingkatkan. Keterbatasan pemahaman itu juga terjadi di antara para perencana dan pelaksana pembangunan yang memperlambat upaya-upaya mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan. Upaya sosialisasi tentang Anggaran dan Perencanaan Berbasis Gender belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
- 9) Masalah lainnya adalah belum tersedianya data hasil pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemukan masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik, jika ada kelembagaan yang menanganinya, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah. Di era

desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (propinsi dan kabupaten/kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Karena program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas bidang, maka diperlukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, termasuk dalam pemenuhan komitmen internasional (seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*, *Beijing Platform for Action*, *Convention on the Rights of the Children*, dan *World Fit for Children*). Komitmen tersebut pada dasarnya mendorong semua negara agar mengintegrasikan persamaan hak dan penghapusan diskriminasi pada semua peraturan perundang-undangan, program dan kegiatan serta melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggarannya.

Program KB di Jawa Barat sejak dicanangkan pemerintah pada tahun 1970 telah memberikan kontribusi terhadap penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk yaitu dari 2,66 per-tahun pada periode tahun 1970-1980 turun menjadi 2,57 per-tahun pada periode 1980-1990. Pada periode tahun 1990-2000 menjadi 2,03 per-tahun, serta turun kembali menjadi 1,89 per-tahun pada periode tahun 2000-2012.

Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk tersebut seiring dengan penurunan Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR), yaitu TFR pada tahun 1970 sebesar 5,9 (SP 70) telah berhasil diturunkan menjadi 5,04 pada tahun 1980 (SP 1980). Pada tahun 1990 turun kembali menjadi 3,37 (SP 1990) dan turun menjadi 2,6 berdasar data SDKI 2007. Pada tahun 2012, TFR menjadi 2,5.

Penurunan TFR terjadi karena Jawa Barat berhasil dalam meningkatkan kesertaan Pasangan Usia Subur untuk segera menggunakan metode kontrasepsi sebagai peserta KB Aktif, dalam upaya pengaturan kehamilan/kelahiran. Sampai dengan akhir tahun 2011, dari Pasangan Usia Subur sebanyak 8,619,022 telah berhasil menjadi peserta KB 6,273,365 atau sekitar 72,79%. Tetapi dari keberhasilan tersebut program KB di Jawa Barat masih memerlukan upaya maksimal dimasa mendatang, khususnya dalam mendukung upaya pembangunan SDM Jawa Barat melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Angka Kelahiran Total (TFR).

Berdasarkan kondisi pelaksanaan program KB selama ini, terdapat isu strategis program KB di Jawa Barat yaitu :

1) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) masih tinggi

Jawa Barat dengan jumlah penduduk sekitar 42 juta merupakan provinsi terbesar dalam hal jumlah penduduk dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk sekitar 1,84% pertahun maka perkiraan pertambahan jumlah penduduk pertahun sekitar 700 ribu s/d 800 ribu pertahun.

2) *Total Fertility Rate* (TFR) masih tinggi

*Total Fertility Rate* (TFR) atau Angka Kelahiran Total merupakan rata-rata potensi melahirkan dari setiap wanita usia subur. Walaupun TFR Jawa Barat mengalami penurunan pada setiap periode, namun angka TFR sekitar 2,5 (SDKI 2012) masih cukup tinggi apabila dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah untuk mencapai Penduduk Tanpa Pertumbuhan pada tahun 2055. Penduduk Tanpa Pertumbuhan akan tercapai apabila telah dicapai angka TFR sebesar 2,1 yang ditargetkan dicapai pada tahun 2015 atau paling lambat pada tahun 2020, dengan angka Net Reproduksi Rate (NRR) 1 (satu) yaitu rata-rata setiap keluarga hanya mempunyai anak perempuan 1 (satu) orang sebagai pengganti ibu untuk meneruskan keturunannya.

3) Kuantitas dan Kualitas Kesertaan ber-KB masih rendah

Dalam upaya penurunan angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* (TFR) perlu didukung dengan kualitas dan kuantitas tingkat kesertaan KB dari Pasangan Usia Subur dalam jangka panjang (KB Lestari). Jawa Barat dengan kesertaan KB sekitar 72,79% (Hasil Pendataan Keluarga tahun 2011) sudah cukup tinggi, namun dari segi kualitas penggunaan yaitu tingkat kelangsungan penggunaan kontrasepsi (CR) dan efektivitas penggunaan metode kontrasepsi (CE) masih rendah, hal ini dapat dilihat dari tingkat drop out peserta KB yang cukup tinggi yaitu sekitar 800 ribu sampai 1 juta per tahun. Hal lainnya adalah proporsi penggunaan metode kontrasepsi masih didominasi oleh kaum perempuan yaitu sekitar 98% dan kaum laki-laki hanya sekitar 2% (kondom dan Metode Operasi Pria).

4) Perkawinan Usia Dini

Perkawinan Usia Dini mempunyai efek ganda terhadap kuantitas dan kualitas penduduk/keluarga dimasa mendatang. Pengaruh perkawinan usia dini sangat berpengaruh terhadap tingginya angka kelahiran, karena dengan usia kawin yang lebih dini atau muda maka kesempatan untuk mempunyai jumlah anak banyak akan lebih terbuka lebar. Begitu pula dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga, dengan kawin usia dini atau muda akan dihadapkan kepada berbagai resiko, antara lain resiko ekonomi, sosial, kesehatan serta resiko ketahanan keluarga.



Perkawinan Usia Dini akan memberikan kontribusi terhadap tingginya kasus kematian ibu melahirkan, kematian bayi, ketidak harmonisan keluarga dan perceraian, serta kasus lainnya yang lebih banyak merugikan kaum perempuan. Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita di Jawa Barat masih cukup rendah yaitu sekitar 18,90 tahun, berarti masih dibawah rata-rata usia kawin ideal yaitu 20 tahun. Akibatnya, angka kelahiran dari kelompok umur 15-19 tahun (ASFR 15-19) di Jawa Barat menurut SDKI 2007 masih cukup tinggi yaitu sekitar 73.

5) Belum mantapnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Melaksanakan praktek keluarga berencana dengan pendekatan kontrasepsi untuk mengatur jumlah anak yang ideal (misalnya 2 anak) belum tentu menjamin terwujudnya Keluarga Bahagia dan Sejahtera. Sangat banyak keluarga Jawa Barat yang masih dalam kategori miskin, meskipun hanya memiliki 2 (dua) bahkan satu anak. Praktek Keluarga Berencana untuk program pengaturan kelahiran secara simultan harus diiringi dengan program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga, misalnya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), serta kegiatan terintegrasi lainnya.

Berdasarkan berbagai isu strategis diatas, ditetapkan skor kriteria seperti pada tabel berikut yang menampilkan penentuan bobot isu-isu strategis, ditentukan melalui beberapa kriteria, yaitu:

- 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi Jawa Barat
- 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab BP3AKB
- 3) Dampak yang ditimbulkan terhadap publik
- 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
- 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
- 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Tabel 3.5.  
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi Jawa Barat	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab BP3AKB	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Selanjutnya dilakukan penilaian antara kriteria dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang seperti tampak pada Tabel 3.9.

Tabel 3.6.  
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rendahnya indeks pendidikan perempuan	5	2	4	5	2	2	20
2	Rendahnya pelayanan kesehatan perempuan	5	2	4	5	2	1	19
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih relatif rendah	4	2	4	4	2	2	18
4	Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	2	2	3	4	2	3	16
5	Tindak kekerasan terhadap perempuan masih tinggi	2	5	4	3	2	2	18
6	Rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda	3	4	4	4	2	3	20
7	Kualitas hidup anak Indonesia juga masih rendah	2	5	3	2	2	2	16
8	Banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender	2	5	4	3	2	2	18
9	Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan	3	5	3	5	2	2	20
10	Belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin	3	5	3	3	3	1	18
11	Tingginya LPP	4	4	4	4	2	2	20
12	Tingginya TFR	3	4	4	3	2	2	18
13	Kuantitas dan Kualitas Kesertaan ber-KB masih rendah	3	4	4	3	2	2	18
14	Tingginya Perkawinan Usia Dini	3	5	4	3	2	2	19

Nilai skala kriteria isu-isu strategis memiliki kisaran yang rendah, hampir semua memiliki skala sama penting, terlihat dari kisaran nilai antara 16 – 20. Indeks yang terkait pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan/ ekonomi merupakan komponen-komponen pendukung Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indikator pembangunan secara keseluruhan sehingga merupakan kriteria yang penting.

Demikian pula halnya dengan pemahaman gender, merupakan kriteria yang penting, sebab apabila sudah dipahami secara meluas, maka kesempatan berkiprah dalam pembangunan tidak akan dibatasi perbedaan gender. Kondisi ini akan mendorong peningkatan angka-angka IPM tanpa dibatasi perbedaan gender.

Setelah penetapan nilai skala kriteria isu penting, total skor kemudian dibagi dengan banyaknya jumlah kriteria, yaitu 6 (enam) sehingga diperoleh rata-rata skor seperti pada Tabel 3.10.

Tabel 3.7.  
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya indeks pendidikan perempuan	20	3.33
2	Rendahnya pelayanan kesehatan perempuan	19	3.17
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih relatif rendah	18	3.00
4	Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	16	2.67
5	Tindak kekerasan terhadap perempuan masih tinggi	18	3.00
6	Rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda	20	3.33
7	Kualitas hidup anak Indonesia juga masih rendah	16	2.67
8	Banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender	18	3.00
9	Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan	20	3.33
10	Belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin	18	3.00
11	Tingginya LPP	20	3.00
12	Tingginya TFR	18	3.00
13	Kuantitas dan Kualitas Kesertaan ber-KB masih rendah	18	3.00
14	Tingginya Perkawinan Usia Dini	19	3.17

Rata-rata skor selanjutnya ikut menentukan program/kegiatan strategis BP3AKB yang akan dilaksanakan untuk menangani berbagai permasalahan yang ada.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi BP3AKB Provinsi Jawa Barat**

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting aktual yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya khususnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proposional dan bertanggung jawab sekaligus dengan program meningkatkan SDM perempuan, kedudukan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan serta menekan dan semaksimal mungkin menghilangkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara konseptual Visi Misi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana senantiasa bermuara kepada ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan ber-negara dan sesuai pula dengan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 serta Visi Pemerintah Daerah Tahun 2013-2018, maka ditetapkan **Visi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana** dalam rangka mendukung Visi Jawa Barat tersebut adalah :

***"Terwujudnya Keluarga Jawa Barat Yang Mandiri, Sehat dan Sejahtera".***

*Keluarga Mandiri* adalah "Sikap dan kondisi keluarga yang tahu, mau, mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kekuatan sendiri"

*Keluarga Sehat* adalah "Sikap dan kondisi keluarga yang berperilaku hidup Bersih dan Sehat sehingga dapat menjadi keluarga yang sehat badan, jiwa dan sosial"

*Keluarga Sejahtera* adalah "Sikap dan kondisi keluarga yang secara Lahir dan Batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan"

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan

**Misi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana** Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dalam 4 (empat) Misi yaitu :

1. *Meningkatkan Pelaksanaan dan Memperkuat Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)*
2. *Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Perempuan, serta Fasilitasi Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak*
3. *Fasilitasi Pelayanan Program KB, Ketahanan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan*
4. *Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Kelembagaan.*

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas maka Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar :

**A. Iman dan Takwa :**

Dalam melaksanakan kegiatan semua staf Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat akan selalu mendasarinya dengan dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan menganggap pekerjaan sebagai ibadah.

**B. Profesionalisme :**

Dalam melaksanakan kegiatan semua staf Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana bersikap dan bertindak Profesional, senantiasa melaksanakan perubahan untuk mencapai keterampilan dan kompetensi yang lebih baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan

**C. Integritas yang Tinggi :**

Dalam melaksanakan kegiatan semua staf Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dengan dasar ketulusan hati, kejujuran, kepribadian yang teguh dan moral yang tinggi

**D. Kerjasama Tim :**

Dalam melaksanakan kegiatan semua staf Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana akan membina kerjasama Tim yang utuh dan kompak, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme dalam upaya pencapaian Visi dan Misi.

**E. Transparan dan Akuntabel :**

Dalam menyelenggarakan kegiatan semua staf Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana akan melaksanakan secara transparan, dapat dipertanggung-jawabkan dan dipertanggung-gugatkan kepada masyarakat.

## **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP3AKB**

Tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 adalah :

- 1) Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya
- 2) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia.

Sasaran pembangunan :

- 1) Meningkatnya aksesibilitas kualitas Layanan kesehatan Masyarakat yang terjangkau dan merata
- 2) Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga.

Secara rinci, BP3AKB menetapkan tujuan dan sasaran berikut.

### **MISI 1**

Meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

#### **Tujuan :**

Meningkatkan implementasi dan kerjasama pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan daerah Jawa Barat.

#### **Sasaran Strategis:**

***Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan***

#### **Sasaran antara :**

- Meningkatkan upaya membangun kesetaraan dan keadilan gender
- Meningkatkan upaya memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender
- Meningkatkan kerjasama PUG antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
- Meningkatkan sistem informasi dan kerjasama melalui Web SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak)
- Meningkatkan percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada OPD di Provinsi Jawa Barat serta memperkuat Gender Focal Point / POKJA PUG yang sudah terbentuk di OPD OPD Provinsi Jawa Barat.

## **MISI 2**

Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan produktifitas ekonomi perempuan, serta fasilitasi perlindungan terhadap perempuan dan anak

### **Tujuan :**

Meningkatkan kualitas hidup perempuan serta fasilitasi perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak.

### **Sasaran strategis :**

***Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak***

### **Sasaran antara :**

- Meningkatkan upaya membangun kualitas hidup perempuan khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, politik dan meningkatnya produktifitas ekonomi perempuan
- Perlindungan, pencegahan dan penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan / eksploitasi perempuan dan anak
- Penguatan, penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak serta pencegahan timbulnya permasalahan tumbuh kembang dan perlindungan anak terhadap berbagai tindakan atau kejadian penelantaran dan perlakuan salah serta dari dampak negatif arus Globalisasi
- Fasilitasi pengembangan bakat, minat, potensi dan kemandirian anak termasuk mendengar suara anak, serta revitalisasi penanaman nilai-nilai luhur yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak
- Optimalisasi kerja sama kelembagaan dan pengembangan jaringan lokal nasional, regional dan internasional.

## **Misi 3**

Fasilitasi pelayanan program KB, ketahanan keluarga, dan pengendalian kependudukan

### **Tujuan :**

Pengendalian kependudukan dan meningkatkan ketahanan keluarga.

### **Sasaran strategis :**

***Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya ketahanan keluarga.***

### **Sasaran antara :**

- Meningkatnya peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru, termasuk didalamnya penurunan tingkat drop out peserta KB, meningkatnya peserta KB Mandiri, serta meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB
- Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan
- Penurunan jumlah keluarga PraSejahtera.

#### Misi 4 –Misi ke 4 adalah Misi pendukung pelayanan pemerintahan

*Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan program dan sumber daya*

##### Tujuan :

Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan program sumber daya, sarana, dan keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

##### Sasaran :

***Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan program dan sumber daya.***

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah RENSTRA BP3AKB beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BP3AKB (RENSRA BP3AKB)

NO.	TUJUAN RENSTRA BP3AKB	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1 2014	2 2015	3 2016	4 2017	5 2018
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan implementasi dan kerjasama pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan daerah Jawa Barat	Indeks Pembangunan Gender (IPG 68 poin)	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	65,25	66,07	67,0	67,5	68
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,0	72,02	73,0	73,5	75,0
				Penghargaan Presiden RI "Anugerah Parahita Eka Praya" (APE)	1	0	1	0	1
				Total (kumulatif sejak 2011)	4	4	5	5	6
2	Meningkatkan kualitas hidup perempuan serta fasilitasi perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	Indeks Komposit Kesejahteraan (71 poin)	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%
				Prosentase anggota parlemen perempuan (%)	26	26	26	30	30
				Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program PEKKA (Jumlah Kelompok PEKKA)	27	27	27	27	27
				Total	491	518	545	572	599
				Jumlah Desa/Kelurahan P2WKSS (desa/kel)	27	27	27	27	27
				Total	157	184	211	238	265
				Jumlah Kota Layak Anak /KLA (desa/kelurahan)	27	11	10	8	8
3	Pengendalian kependudukan dan Meningkatkan Ketahanan Keluarga	Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga (71,1 poin)	Menurunnya angka kelahiran dan peningkatan ketahanan keluarga	Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur	64,6	65,2	65,8	66,5	67,1
				Prosentase Peserta KB Mandiri	49,50	50,10	50,60	51,10	51,60
				Prosentase Peserta KB Pria	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50
				Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW)	19,8	20,15	20,5	20,9	21,32
				Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	2.273.608	2.020.985	1.768.362	1.515.739	1.263.116



#### **MISI 4**

Meningkatkan kapabilitas manajemen kelembagaan

##### **Tujuan :**

Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan program sumber daya, sarana, dan keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.

##### **Sasaran :**

Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan program dan sumberdaya :

- a. Sinkronisasi Perencanaan dan perencanaan yang berbasis data
- b. Evaluasi dan Pelaporan tepat waktu
- c. Penilaian Kinerja.

#### **4.3. Strategi dan Kebijakan BP3AKB**

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan dan sasarannya, maka untuk memperjelas cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui strategi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang terdiri dari Kebijakan, Program, dan Sasaran Program (sesuai kebijakan, program dan sasaran RPJMD Jawa Barat Tahun 2008 – 2013).

##### **Misi 1**

##### **Strategi :**

- 1) Memantapkan Kinerja Pokja PUG /Focal Point di OPD-OPD
- 2) Memantapkan Penerapan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Berbasis Gender (ARG)
- 3) Penerapan sistem informasi/ data terpilah
- 4) Penyebarluasan informasi, pemahaman dan penerapan PUG.

##### **Kebijakan :**

Terwujudnya pengarusutamaan gender (PUG) dengan melibatkan kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

##### **Kebijakan Pelaksanaan Misi 1 :**

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan OPD-OPD untuk penguatan kelembagaan PUG
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan lembaga koordinator anggaran dalam upaya pemberdayaan perempuan melalui dukungan ARG

- 3) Menyediakan informasi/data gender dan anak
- 4) Menyebarluaskan informasi PUG kepada masyarakat melalui Web SIGA.

**Program :**

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan.

**Misi 2**

**Strategi :**

- 1) Fasilitasi Penyediaan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan perempuan
- 2) Fasilitasi Peningkatan pelayanan lembaga ekonomi dan lapang kerja bagi perempuan
- 3) Fasilitasi Peningkatan pendidikan dan wawasan politik bagi perempuan
- 4) Sosialisasi dan implementasi Undang undang perlindungan perempuan dan anak sesuai hak-hak perempuan dan anak
- 5) Sosialisasi prosedur penanganan kasus KDRT dan Peningkatan fasilitasi bagi lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai jenis kekerasan
- 6) Peningkatan sosialisasi hak dan kewajiban pendidik, orangtua dan anak beserta dampak negatif
- 7) Pengembangan kegiatan kreatif bagi anak
- 8) Optimalisasi kerjasama dan pengembangan jejaring kerjasama.

**Kebijakan :**

Meningkatkan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan serta perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak

**Kebijakan Pelaksanaan Misi 2 :**

- 1) Meningkatkan fasilitasi pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi perempuan
- 2) Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha
- 3) Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan domestik dan kekerasan pada lingkungan komunitas lainnya, serta perdagangan perempuan dan anak
- 4) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik dan jabatan politik

- 5) Mengembangkan pelayanan lembaga pelayanan pengaduan korban kekerasan
- 6) Meningkatkan sosialisasi dan dukungan dukungan advokasi dan fasilitasi bagi Komisi Perlindungan Anak (KPA) khusus bagi daerah dan LSM pemerhati anak
- 7) Meningkatkan sosialisasi perundang-undangan tentang perlindungan terhadap anak dan sanksi pelanggarnya
- 8) Mendorong penyelenggaraan kegiatan kreatif untuk anak
- 9) Mengembangkan koordinasi dan mendorong tersedianya akses kerjasama dan pengembangan jejaring
- 10) Meningkatkan akses dan informasi bagi anak

**Program :**

Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.

**Misi 3**

**Strategi :**

- 1) Kerjasama penyediaan data base KB dan penyebarluasan informasi KB
- 2) Sosialisasi sistim dan metode KB
- 3) Penataan administrasi kependudukan
- 4) Pembentukan kelompok remaja/masyarakat pendukung KB
- 5) Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan PUP
- 6) Peningkatan usaha ekonomi perempuan.

**Kebijakan :**

Revitalisasi program KB dalam menurunkan angka kelahiran untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

**Kebijakan Pelaksanaan Misi 3 :**

- 1) Revitalisasi program KB dalam menurunkan angka kelahiran untuk mewujudkan keluarga sejahtera
- 2) Meningkatkan pengetahuan reproduksi dan pengendalian penduduk
- 3) Menyebarluaskan informasi KB
- 4) Meningkatkan upaya pembentukan kelompok remaja /masyarakat pendukung program KB
- 5) Mengembangkan informasi kesehatan reproduksi remaja dan PUP
- 6) Mendorong pembentukan dan aktifitas usaha ekonomi perempuan
- 7) Meningkatkan penataan administrasi kependudukan.

**Program :**

Program Pelayanan Keluarga Berencana  
 Program Peningkatan Usia Perkawinan  
 Program Ketahanan Keluarga  
 Program Penataan Administrasi Kependudukan

**Misi 4****Kebijakan Pelaksanaan Misi 4 :**

Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan program, aparatur, sarana dan prasarana serta keuangan

**Program :**

- 1) Program Perencanaan Pengendalian Pengawasan Pembangunan Daerah
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 6) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pada Tabel dibawah ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BP3AKB dalam lima tahun mendatang.

Tabel 4.2.  
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : <b><i>Terwujudnya Keluarga Jawa Barat Yang Mandiri, Sehat dan Sejahtera</i></b>			
<i>Misi I : Meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan Pengarusutamaan Gender</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan implementasi dan kerjasama pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan daerah Jawa Barat	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Memantapkan Kinerja Pokja PUG /Focal Point di OPD-OPD	Terwujudnya pengarusutamaan gender (PUG) dengan melibatkan kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
		Memantapkan Penerapan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Berbasis Gender (ARG)	
		Penerapan sistem informasi/ data terpilah	
		Penyebarluasan informasi, pemahaman dan penerapan PUG	

MISI II : Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas hidup perempuan serta fasilitasi perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Fasilitasi Penyediaan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan perempuan	Meningkatkan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan serta perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak
		Fasilitasi Peningkatan pelayanan lembaga ekonomi dan lapang kerja bagi perempuan	
		Fasilitasi Peningkatan pendidikan dan wawasan politik bagi perempuan	
		Sosialisasi dan implementasi Undang undang perlindungan perempuan dan anak sesuai hak-hak perempuan dan anak	
		Sosialisasi prosedur penanganan kasus KDRT dan Peningkatan fasilitasi bagi lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai jenis kekerasan	
		Peningkatan sosialisasi hak dan kewajiban pendidik, orangtua dan anak beserta dampak negati	
		Pengembangan kegiatan kreatif bagi anak	
		Optimalisasi kerjasama dan pengembangan jejaring kerjasama	
		MISI III : Fasilitasi Pelayanan Program KB, Ketahanan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Pengendalian kependudukan dan meningkatkan ketahanan keluarga	Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya ketahanan keluarga	Kerjasama penyediaan data base KB dan penyebarluasan informasi KB	Revitalisasi program KB dalam menurunkan angka kelahiran untuk mewujudkan keluarga sejahtera
		Sosialisasi sistim dan metode KB	
		Penataan administrasi kependudukan	
		Pembentukan kelompok remaja/masyarakat pendukung KB	
		Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan PUP	

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program-program utama yang menjadi kewenangan BP3AKB Provinsi Jawa Barat yaitu :

- 1) Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
- 2) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam Pembangunan
- 3) Program Pelayanan Keluarga Berencana
- 4) Program Peningkatan Usia Perkawinan
- 5) Program Ketahanan Keluarga
- 6) Program Penataan Administrasi Kependudukan.

#### **1) Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak**

##### **Sasaran Program :**

- Meningkatnya Jumlah Desa/kelurahan P2WKSS
- Meningkatnya Jumlah Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
- Meningkatnya Jumlah Kota Layak Anak (Desa/Kelurahan serta lingkungan) yang layak anak
- Meningkatnya cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Menurunnya kasus kekerasan dan trafficking
- Meningkatnya Prosentase Anggota Parlemen Perempuan.

##### **Rencana Kegiatan :**

- 1) Fasilitasi dan Advokasi Perempuan dalam Kemandirian Berusaha (PEKKA)
- 2) Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
- 3) Fasilitasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)
- 4) Perlindungan Perempuan (Trafficking, KDRT dan Pornografi)
- 5) Bantuan Modal Bagi Korban Perdagangan Orang (Trafficking)
- 6) Peringatan Hari Nasional Perempuan
- 7) Bantuan Hibah Program P2WKSS di 26 Kabupaten/Kota
- 8) Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Kreativitas dan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak
- 9) Jambore Forum Anak
- 10) Revitalisasi Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)
- 11) Fasilitasi Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)
- 12) Fasilitasi Perlindungan Anak.

## **2) Program Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**

### **Sasaran Program :**

- Meningkatnya indeks pembangunan gender
- Meningkatnya indeks pemberdayaan gender
- Meningkatnya pembangunan setara gender melalui Anggaran Responsif Gender

### **Rencana Kegiatan :**

- 1) Gerakan Pengarustamaan Keluarga (PUK)
- 2) Jejaring Kelembagaan dan Kerjasama Potensi Jawa Barat
- 3) Gerakan Pengarusutamaan Gender :
  - Fasilitasi Anugerah Parahyta Ekapraya (APE)
  - Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat
  - Penyusunan kebijakan pengarusutamaan gender.
- 4) Pengumpulan data dan Informasi Gender
- 6) Pembinaan organisasi perempuan di Jawa Barat

## **3) Program Pelayanan Keluarga Berencana**

### **Sasaran Program :**

- Meningkatnya kuantitas dan kualitas peserta Keluarga Berencana

### **Rencana Kegiatan :**

- 1) Peningkatan Kesertaan ber KB
- 2) Bantuan Hibah Kepada Kelompok Paguyuban KB Pria

## **4) Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)**

### **Sasaran Program :**

- Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama wanita

### **Rencana Kegiatan :**

Pendewasaan Usia Perkawinan

## **5) Program Ketahanan Keluarga**

### **Sasaran Program :**

- Meningkatnya jumlah tenaga Penggerak KB Desa/Kelurahan
- Meningkatnya ketahanan keluarga.

**Rencana Kegiatan :**

- 1) Ketahanan keluarga
- 2) Pembentukan Kader Motivator Ketahanan Keluarga.

**6) Program Penataan Administrasi Kependudukan****Sasaran Program :**

- Tersedianya data kependudukan yang akurat

**Rencana Kegiatan :**

Sosialisasi dan Promosi Pengendalian Kependudukan.

**Program-program pendukung :**

- Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

**Sasaran Program :**

- Tersusunnya Renja, Renstra, LAKIP dan LKPJ Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
- Sumber daya aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
- Sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

**Rencana Kegiatan :**

- 1) Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
- 2) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BP3AKB
- 3) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BP3AKB
- 4) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
- 5) Rehabilitasi Gedung Perkantoran BP3AKB
- 6) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BP3AKB
- 7) Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal BP3AKB.



Tabel 5.1. berikut, berisi Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator BP3APKB Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Lampiran.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator BP3APKB Provinsi Jawa Barat																	
TUJUAN MISI 1 : Membangun SDM Jawa Barat yang menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya																	
No	SASARAN MISI DAERAH	STRATEGI RPJMD	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RESNTRA	SASARAN STRATEGIS RENSTRA OPD	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-							
	1.4. Meningkatkan kualitas Ketahanan Keluarga	1.4.2. Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan implementasi dan kerjasama pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah Jawa Barat	Indeks Pembangunan Gender IPG (68 poin)	Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan											
						Gerakan Pengarusutamaan Keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin kumulatif	64.25	65.25	66.07	67	67.5	68			
						Gerakan Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	poin kumulatif	69.70	70.00	72.02	73.00	73.50	75.00			
		AK: Terwujudnya pemberdayaan perempuan					Perolehan Penghargaan Presiden RI "Anugrah Parahita Eka Praya" (APE)	buah kumulatif	3	1	0	1	0	1			
		1.4.1. Meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan	Meningkatkan kualitas hidup perempuan serta fasilitasi perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	Indeks Komposit Kesejahteraan (71 poin)	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak											
						Fasilitasi dan Advokasi Perempuan dan Kemandirian Berusaha (PEKKA)	Jumlah Kelompok PEKKA (Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui program PEKKA)	unit	464	491	518	545	572	599			
						Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Desa/Kelurahan P2WKSS	desa, kelurahan (kumulatif)	130	157	184	211	238	265			
						Fasilitasi Kaucus Perempuan Politik Indonesia (KPPPI) Pembinaan Capacity Building bagi Calon Legislatif	Prosentase Anggota Parlemen perempuan	persen kumulatif	24%	26%	26%	26%	26%	30%			
		1.4.3. Mencegah dan menangani korban kekerasan thd perempuan dan anak serta perdagangan orang (trafficking)	Meningkatkan kualitas hidup perempuan serta fasilitasi perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak			Perlindungan Perempuan (Trafficking, KDRT dan Pornografi)	Menurunnya Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan	persen	100	-	-	10	10	10			
						Cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap		persen/ tahun	100	100	100	100	100	100			
						Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kota Layak Anak	desa/ kel kumulatif	23	27	38	48	56	64			
	1.2. Meningkatnya kualitas aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	1.2.5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB	Pengendalian kependudukan dan meningkatkan ketahanan keluarga	Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga (71,1 poin)	Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya ketahanan keluarga.	Program Pelayanan Keluarga Berencana											
		AK: Revitalisasi Program KB dan KK				Peningkatan Kesertaan ber-KB	Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur	persen	63.90	64.6	65.2	65.8	66.5	67.1			
						Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)			49.00%					51.6			
						Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW)	Tahun	19.55	19.8	20.15	20.5	20.9	21.32			
No	SASARAN MISI DAERAH	STRATEGI RPJMD	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RESNTRA	SASARAN STRATEGIS RENSTRA OPD	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-							
						Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga											
						Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebagai Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar)	Menurunnya Jumlah keluarga Pra sejahtera	keluarga (kumulatif)	2.526.361	2.273.608	2.020.985	1.768.362	1.515.739	1.263.116			
						Ketahanan Keluarga											
	3.1. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif	Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan program sumber daya, sarana, dan keuangan lembaga		Meningkatkannya kualitas manajemen pengelolaan program dan sumberdaya	Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah											
						Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Tahun mendatang	Dok/th	1	1	1	1	1	1			
						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	pengembangan aparatur			100%	100%	100%	100%	100%			
						Aparatur BP3APKKB		persen									
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
						Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BP3APKKB	Peningkatan kualitas SDM	persen		100%	100%	100%	100%	100%			
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
						Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	penyelenggaraan administrasi perkantoran	persen		100%	100%	100%	100%	100%			
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
						Rehabilitasi Gedung Perkantoran	Rehabilitasi Gedung BPPKB	persen		-	-	100%	100%	100%			
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BP3APKKB	Pengadaan sarana dan prasarana kantor BP3APKKB	persen		100%	100%	100%	100%	100%			
						Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur											
						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BP3APKKB	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor BP3APKKB	persen		100%	100%	100%	100%	100%			
						Program Peningkatan											
						Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal BP3APKKB	Dokumen perencanaan : RENSTRA, RENUA, RKT dan Dokumen laporan : LAKIP, LKPI, LPPD IKK	dokumen/ tahun	7	7	7	7	7	7			

Tabel 5.2.  
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Akhir Periode Renstra BP3AKB			
Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
IDG	5,503,000,000	IDG	1,299,500,000	IDG	1,391,951,625	IDG	3 M	IDG	4 M	IDG	4 M	BP3AKB	26 kab/kota
IPG	3,496,845,000	IPG	6,377,010,000	IPG	6,711,320,856	IPG	8 M	IPG	10 M	IPG	10 M	BP3AKB	26 kab/kota
KB	11,636,850,000	KB	2,181,270,000	KB	1,885,732,303	KB	2 M	KB	3 M	KB	3 M	BP3AKB	26 kab/kota

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA RENSTRA BP3AKB**

Indikator kinerja Renstra BP3AKB Tahun 2014 - 2018 berdasarkan isu-isu strategis serta kondisi yang ada adalah :

Indeks Pemberdayaan Gender  
Indeks Pembangunan Gender  
Penghargaan Presiden RI "Anugerah Parahita Ekapraya"  
Jumlah Kelompok Perempuan Kepala Keluarga /PEKKA (Pemberdayaan perempuan melalui Program PEKKA)  
Jumlah Desa/Kelurahan P2WKSS  
Cakupan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak  
Prosentase kasus trafiking (perempuan)  
Jumlah Kota Layak Anak (KLA)  
Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur  
Prosentase Peserta KB Mandiri  
Prosentase Peserta KB Pria  
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita  
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera

Rincian rencana capaian indikator sasaran seperti terlampir pada Tabel 5.1.

Sedangkan Indikator kinerja Renstra BP3AKB yang mengacu kepada Indikator kinerja RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah :

- Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- Prosentase anggota parlemen perempuan
- Jumlah Desa/Kelurahan P2WKSS
- Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui program PEKKA
- Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan
- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
- Jumlah Kota Layak Anak
- Jumlah keluarga Pra Sejahtera
- Prosentase Peserta KB Aktif
- Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita
- Jumlah Keluarga Pra Sejahtera

Tabel 6.1

## Indikator Kinerja BP3AKB Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0 2013	Tahun 2014	Tahun 2 2015	Tahun 3 2016	Tahun 4 2017	Tahun 5 2018	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	64,25	65,25	66,67	67	67,5	68	68
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,7	70	72,02	73	73,5	75	75
3	Menurunnya Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan	100	-	-	10	10	10	70
4	Cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah Kota Layak Anak	23	27	38	48	56	64	64
6	Prosentase anggota parlemen perempuan	26	26	26	26	26	30	30
7	Jumlah Desa/Kelurahan P2WKSS	130	157	184	211	238	265	265
8	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui program PEKKA (Jumlah Kelompok PEKKA)	464	491	518	545	572	599	599
9	Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur	63.90	64.6	65.2	65.8	66.5	67.1	67.1
10	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW)	19,8	20,15	20,5	20,9	21,32	19,55	19,55
11	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	2.526.361	2.273.608	2.020.985	1.768.362	1.515.739	1.263.116	1.263.116
12	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	2.526.361	2.273.608	2.020.985	1.768.362	1.515.739	1.263.116	1.263.116

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (RENSTRA BP3AKB) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yang sekaligus pula merupakan Rencana Strategis Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat telah dapat disusun.

Rencana Strategis ini disusun untuk lebih memfokuskan upaya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi tantangan dan masalah pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang makin kompleks terutama dalam menghadapi tantangan global dan Nasional.

Rencana Strategis BP3AKB Provinsi Jawa Barat ini diharapkan akan dapat dijadikan acuan oleh seluruh petugas atau pelaksana program/kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Barat dalam kemitraan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta lembaga masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan upaya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Kiranya rencana strategis ini dapat pula menjadi acuan bagi Kabupaten dan Kota, sehingga dalam semangat desentralisasi ini ibaratnya sebuah armada dengan menggunakan berbagai jenis kapal yang melaju menuju satu tujuan yang sama yaitu menjadikan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai upaya pemenuhan hak azasi setiap orang untuk dapat *Cageur, Bageur, Bener, Pinter tur Singer*.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat 2013-2018. Semoga tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini tercapai, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkannya. Amin.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA  
BERENCANA PROVINSI JAWA BARAT



**Dr. Hj. NENNY KENCANAWATI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda / IV/c  
NIP. 19570114 1985032 002

Tabel 5.1.

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BP3APKKB Provinsi Jawa Barat**

TUJUAN MISI 1 : Membangun SDM Jawa Barat yang menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya

No	SASARAN MISI DAERAH	STRATEGI RPJMD	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RESNTRA	SASARAN STRATEGIS RENSTRA OPD	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	
	1.4. Meningkatnya kualitas Ketahanan Keluarga	1.4.2. Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan  AK: Terwujudnya pemberdayaan perempuan	Meningkatkan implementasi dan kerjasama pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah Jawa Barat	Indeks Pembangunan Gender /IPG (68 poin)	Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan		
						Gerakan Pengarusutamaan Keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin kumulatif
						Gerakan Pengarustamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	poin kumulatif
							Perolehan Penghargaan Presiden RI "Anugrah Parahita Eka Praya" (APE)	buah kumulatif
		1.4.1.Meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan      1.4.3. Mencegah dan menangani korban kekerasan thd perempuan dan anak serta perdagangan orang (trafficking)	Meningkatkan kualitas hidup perempuan serta fasilitasi perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	Indeks Komposit Kesejahteraan (71 poin)	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak		
						Fasilitasi dan Advokasi Perempuan dan Kemandirian Berusaha (PEKKA)	Jumlah Kelompok PEKKA (Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui program PEKKA)	unit
						Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Desa/Kelurahan P2WKSS	desa, kelurahan (kumulatif)
						Fasilitasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Pembinaan Capacity Building bagi Calon Legislatif	Prosentase Anggota Parlemen perempuan	persen kumulatif
						Perlindungan Perempuan (Trafiking, KDRT dan Pornografi)	Menurunnya Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan	persen
							Cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen/ tahun
						Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kota Layak Anak	desa/ kel kumulatif
	1.2. Meningkatnya kualitas aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	1.2.5.Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB  AK: Revitalisasi Program KB dan KK	Pengendalian kependudukan dan meningkatkan ketahanan keluarga	Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga (71,1 poin)	Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya ketahanan keluarga.	Program Pelayanan Keluarga Berencana		
						Peningkatan Kesertaan ber-KB	Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur	persen
		Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)						
		Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)				Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW)	Tahun	

No	SASARAN MISI DAERAH	STRATEGI RPJMD	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RESNTRA	SASARAN STRATEGIS RENSTRA OPD	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	
						Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga		
						Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebagai Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar)	Menurunnya Jumlah keluarga Pra sejahtera	keluarga (kumulatif)
						Ketahanan Keluarga		
	3.1. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif	Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan program sumber daya, sarana, dan keuangan lembaga		Meningkatkannya kualitas manajemen pengelolaan program dan sumberdaya	Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah		
						Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Tahun mendatang	Dok/th
						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		
						Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BP3APKKB	pengembangan aparatur	persen
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
						Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BP3APKKB	Peningkatan kualitas SDM	persen
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
						Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	penyelenggaraan administrasi perkantoran	persen
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
						Rehabilitasi Gedung Perkantoran BPPKB	Rehabilitasi Gedung BPPKB	persen
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BP3APKKB	Pengadaan sarana dan prasarana kantor BP3APKKB	persen
						Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		
						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BP3APKKB	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor BP3APKKB	persen
						Program Peningkatan Pengembangan		
						Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal BP3APKKB	Dokumen perencanaan : RENSTRA, RENJA, RKT dan Dokumen laporan : LAKIP, LKPJ, LPPD IKK	dokumen/ tahun

[illegible]



Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Akhir Periode Renstra	Kerangka Pendanaan Tahun ke- (Rp.)					Lokasi
	2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018	
							9,211,029,657	9,227,665,779	8,120,345,885	8,932,380,474	9,825,618,521	27 kab/kota
2.526.361	2.273.608	2.020.985	1.768.362	1.515.739	1.263.116	1.263.116	9,211,029,657	9,227,665,779	8,120,345,885	8,932,380,474	9,825,618,521	27 kab/kota
								0	0	0	0	27 kab/kota
1	1	1	1	1			400,000,000	400,000,000	425,000,000	450,000,000	450,000,000	27 kab/kota
								0	0	0	0	27 kab/kota
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	160,000	176,000	193,600	212,960	234,256	27 kab/kota
								0	0	0	0	27 kab/kota
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	500,750	550,825	605,908	666,498	733,148	27 kab/kota
								0	0	0	0	27 kab/kota
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,500,500	1,650,550	1,815,605	1,997,166	2,196,882	27 kab/kota
								0	0	0	0	27 kab/kota
	-	-	100%	100%	100%	100%	-	4,000,000,000	-	-	-	27 kab/kota
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	835,200	918,720	1,010,592	1,111,651	1,222,816	27 kab/kota
								0	0	0	0	27 kab/kota
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,300,500	1,430,550	1,573,605	1,730,966	1,904,062	27 kab/kota
								0	0	0	0	27 kab/kota
7	7	7	7	7	7	35	100,000	110,000	121,000	133,100	146,410	27 kab/kota